MAKNA KEPEMIMPINAN POLITIK KYAI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TUNGGALPAGER KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Politik Islam

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K U-2010 014 P1
No. REG : U-2010/P1/014
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Disusun oleh:

BADRUL ANAM
NIM:E04206021

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS USHULUDDIN
PRODI POLITIK ISLAM
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Badrul Anam ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 26 Juli 2010
Pembimbing,

DR. Biyanto, M.Ag.
NIP. 197210101996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Badrul Anam ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Agustus 2010

Mengesahkan,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin
Dekan,

Drs. Ma'sum Nurajim, M.Ag.
NIP. 196009141989031001

Ketua,

DR. Biyanto, M.Ag.
NIP. 197210101996031001

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, S.Th. M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I,

Dra. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji II,

Andi Suwarko, M.Si
NIP. 197411102003121004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAKSI

Judul Skripsi : Makna Kepemimpinan Politik Kyai Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Pembimbing : **DR. Biyanto, M.Ag.**

Penulis : **Badrul Anam**

Key word: Politik Kyai, Kepemimpinan.

Bagi penduduk desa, pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan sebuah arena demokrasi paling nyata. Dalam proses pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar karena pemilihannya diselenggarakan secara langsung dengan sistem *One Man One Vote*.

Kyai, sebagai sebutan kehormatan bagi elit agama khususnya di Jawa, masih sering diperdebatkan; lebih-lebih jika dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat, terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kyai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan; 1) Tanggapan masyarakat terhadap kepemimpinan kyai di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. 2) Tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu data yang di peroleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kyai di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

   Kepatuhan masyarakat terhadap kyai yang ada di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang dianggap memiliki kelebihan dari orang lain, para kyai sering dimintai saran atau pendapat dalam persoalan-persoalan yang kerap kali muncul dalam wacana kehidupan sehari-hari. Kekuatan kepemimpinan kyai di Desa Tunggalpager yang didukung dengan kharisma akan membuat masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin patuh. Kharisma yang dimilikinya akan membuat warga sekitar merasa segan untuk menolak ajakan atau himbauan. Mereka menganggap para kyai memiliki kelebihan akan hal-hal ghoib yang masih kental dalam pola pikir mereka.

Ada beberapa alasan mengapa seorang kyai wajib di hormati yaitu:

a. Kyai adalah orang yang dituakan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap kyai seperi orang tua sendiri.
b. Kyai memiliki banyak ilmu agama yang tinggi dan setiap orang tidak bisa memilikinya.
c. Saran atau petuah yang disampaikan kyai sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.
d. Kyai memiliki kharisma yang biasanya di peroleh dari keturunan ataupun kelebihan yang di berikan dari Tuhan YME.

2. Keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Dari berbagai responden ada beberapa kegiatan yang mengindikasikan keterlibatan kyai dalam Pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2007. Bentuk-bentuk keterlibatannya adalah sebagai berikut:

a. Merestui pencalonan seorang calon
b. Ceramah-ceramah keagamaan atau pengajian
c. Memberikan Anjuran kepada masyarakat untuk aktif mencari dukungan terhadap calon kepala desa.

Sedangkan tanggapan masyarakat desa Tunggalpager terhadap keterlibatan kyai dalam pilkades dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis yaitu pilkades
b. Sebagian warga membiarkan keterlibatan kyai dalam pilkades
c. Sebagian menyetujui keterlibatan kyai dalam kegiatan pilkades asalkan tidak melupakan tugas utamanya mendidik umat tentang masalah-masalah keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi penduduk desa, pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan sebuah arena demokrasi paling nyata. Dalam proses pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar karena pemilihannya diselenggarakan secara langsung dengan sistem *One Man One Vote*.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebutkan secara konstitusional Pilkades dirancang pemerintah dengan prinsip yang sangat demokratis. pemilihan dilaksanakan secara langsung, jujur dan adil serta melibatkan masyarakat secara penuh.[1]

Bagi warga desa, pilkades benar-benar ingin dijadikan sebagai momentum untuk memilih seorang pemimpin yang dinilai mampu membawa kemajuan desa melalui proses pemilihan yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil.

Tetapi di banyak desa, pilkades yang demokratis itu tak urung harus dibayar dengan harga yang tinggi. Kemenangan seorang kandidat kades yang sangat ditentukan oleh dukungan suara individu mengakibatkan polarisasi dibasis-basis komunal. Jadilah, pergolakan politik tidak hanya melibatkan aktor-aktor kandidat

[1] Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Pasal 95 ayat 2 dan 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari kehidupan agama itu sendiri.[3] Semuanya itu membuktikan bahwa intensitas kepedulian kyai dalam politik ternyata masih ada.

Lebih lanjut Dirdjosanjoto menegaskan bahwa sejak semula kyai berada pada posisi mendua: di satu sisi ia adalah seorang tokoh agama, dan di sisi lain ia adalah tokoh politik.[4]

Peran kyai secara ideal adalah yang bersih dari politik praktis dan mengembalikan posisi sebagai sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengedepankan kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, serta mengembalikan ulama sebagai pemimpin yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya posisi kyai dimanfaatkan oleh elite politik.

Bila ditilik dari peranan pendidikan, peranan budaya, peranan politik, peranan ekonomi, dan pola kepemimpinan (*leadership*) yang digunakan, jelas mengindikasikan perbedaan antara kyai satu dengan kyai yang lainnya. Demikian pula apa yang dirasakan sebagai derajat kesalehan yang dimiliki seorang kyai berdasarkan latar belakang pendidikan (*educational background*) dan keahliannya dalam disiplin ilmu keislaman yang dimilikinya memegang peranan sangat besar dalam melakukan pembedaan kedudukan seorang kyai dari kyai-kyai yang lainnya.

Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging merupakan sebuah desa yang memiliki nuansa religiusitas yang cukup tinggi. Terbukti di desa ini tercatat ada 4

---

[3] Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik di Pedesaan: Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik Kiai* (Ringkasan Disertasi). (Jurnal STAIN Malang No. 5. Malang: LP3M, 1998), 61

[4] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat*, 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih calon pemimpin yang dinilai memiliki atau lebih memiliki integritas dan kapabilitas.

Dalam konteks seperti ini, kyai sebagai tokoh agama bertugas mengembalikan arah politik dari politik kekuasaan yang bersandar pada uang dan kapital semata-mata kepada politik kekuasaan yang bertunjang pada etika, moral, dan integritas. Masyarakat secara umum perlu disadarkan bahwa pemimpin yang kuat, jujur, dan kapabel lebih didahulukan daripada pemimpin yang tidak jujur, berintegritas rendah dan melakukan politik uang.

Karena dalam suatu masyarakat, peran elite agama dan elite penguasa cukup signifikan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Sebagai elit agama, kyai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dalam masyarakat yang memberikan pengetahuan Islam kepada para penduduk desa.[2]

Kyai, sebagai sebutan kehormatan bagi elit agama khususnya di Jawa, masih sering diperdebatkan; lebih-lebih jika dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat, terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kyai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan

---

[2] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa.* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Cetakan Pertama (1). 1999), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kades tapi melebar ke konflik antar kampung dan antar individu dan secara otomatis merusak hubungan kekeluargaan, kekerabatan ataupun ketetanggaan.

Selain problem relasi sosial itu, uang juga menjadi masalah tersendiri dalam pilkades. Setiap calon kades bisa diyakini mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Minimal, sekitar dua bulan penuh, calon kades harus mengeluarkan "biaya operasional" untuk jamuan, uang makan, rokok, bensin dan lain-lain.

Politik uang ini bukan peristiwa asing lagi karena terjadi di banyak desa. Karena uang memegang peran penting dalam pilkades, maka sekarang banyak kades yang menolak peraturan pembatasan jabatan kades hanya lima 5 tahun, tapi 6 tahun, sebab masa yang pendek ini belum cukup untuk mengembalikan modal suksesi yang telah dikeluarkan.

Kendala utama pemilihan langsung dalam konteks keindonesiaan adalah keawaman, kebutahurufan, dan kemiskinan sebagian masyarakat. Tampaknya masyarakat Indonesia sebagian besar buta politik dan tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki pemimpin, sedangkan yang memiliki pengetahuan sering kali tidak menjatuhkan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Faktor kemiskinan dari para pemilih menyebabkan suara mereka mudah dibeli dengan harga yang sangat murah. Oleh karena itu, demokrasi harus dibangun beriringan dengan peningkatan pendidikan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Selama kondisi kita masih seperti sekarang ini, arahan dari tokoh masyarakat, terutama tokoh agama dan para kyai sebagai pengawal moral untuk anggota masyarakat yang dianggap awam, sangat diperlukan dengan tujuan agar mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pondok pesantren yang masih eksis sampai saat ini. Pada pilkades yang lalu, salah satu putra pengasuh pesantren "Nahrul Ulum" Wonogiri ikut mencalonkan menjadi kepala desa.

Keikutsertaannya dalam pilkades membuat 2 calon lainnya mengundurkan diri meskipun sudah mengeluarkan biaya cukup banyak. Sebab tradisi masyarakat di Tunggalpager atau desa-desa di sekitarnya, siapapun yang mencalonkan menjadi kepala desa berarti sudah siap membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Biasanya 2 – 3 bulan menjelang pemilihan kepala desa, para calon membuka pintu rumahnya untuk para pendukungnya dengan berbagi macam jamuan. Dari segi finansial, para calon sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit, belum lagi biaya operasional bagi team suksesnya. Demikian pula sewaktu para calon berkeliling untuk sosialisasi, para calon harus siap-siap mengeluarkan biaya manakala menjumpai para pemilih yang kebetulan berada di warung-warung kopi atau lainnya.

Semua ini membuktikan bahwa masih ada aspek-aspek menarik yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut. Kajian ini mencoba untuk memahami makna politik kyai dalam pilihan kepala desa sebagai salah satu bentuk demokrasi pada masyarakat pedesaan yang secara langsung bersinggungan dengan eksistensi kyai ditengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Makna Kepemimpinan Politik Kyai Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, ada beberapa persoalan yang mendasar yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana makna kepemimpinan kyai di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum ingin mendiskripsikan;

1. Makna kepemimpinan kyai di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.
2. Keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

Sumbangan yang bersifat teoritis, yaitu berupa merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam wacana politik, sehingga mampu mendudukkan secara proporsional perbedaan pandangan tentang kyai yang selama ini terjadi dalam memahami pemaknaan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Sedangkan yang bersifat praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan, dalam memahami pengaruh kepemimpinan kyai dalam proses pemilihan kepada desa.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian yang berjudul Makna Kepemimpinan Politik Kyai Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Politik : interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu [5]
2. Kyai : sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai pada agama Islam).[6]
3. Pilkades : adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.[7]

---

[5] Subakti. *Wajah Perpolitikan di Indonesia.* (1992), 11
[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 565
[7] *WWW.Wikipedia.Com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud penulis tentang judul penelitian ini adalah peran politik yang dimiliki dan dilakukan para kyai dalam pandangan masyarakat sekitarnya pada proses pemilihan kepala desa.

F. Telaah Pustaka

1. Imam Suprayogo dalam ringkasan thesisnya, *Kiai dan Politik di Pedesaan: Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik Kiai* (Ringkasan Disertasi). (Jurnal STAIN Malang No. 5. Malang: LP3M, 1998), menyebutkan Sedikitnya ada tiga alasan mengapa kyai selalu terlibat dalam aktifitas politik. *Pertama,* bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi-sisi kehidupan – baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun juga menyangkut persoalan politik. *Kedua*, dengan posisinya sebagai pemuka (elit) agama, ia memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu menyebabkan kyai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan ekonomi. *Ketiga,* dari sisi sejarahnya, kyai memiliki peran yang cukup besar dalam politik, yang hal itu bisa dilihat dalam pergolakan melawan penjajah hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan.[8]

---

[8] Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik di Pedesaan, 62*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Abdurrahman Wahid dalam bukunya *Bunga Rampai Pesantren* CV. Dharma Bhakti Jakarta menyebutkan bahwa kyai memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat menuju pengembangan yang lebih baik. Kyai tidaklah berkeinginan meredam akibat perubahan yang terjadi, tetapi justru mempelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Ia bukan melakukan penyaringan informasi, tetapi menawarkan agenda perubahan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ia sepenuhnya berperan dalam proses perubahan sosial, justru karena ia *mafhum* bahwa perubahan tersebut merupakan *sunnatullah* yang tak terelakkan lagi.
3. Endang Turmudi dalam bukunya *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* Yogyakarta: LkiS, 2004, menyebutkan bahawa keberhasilan kiai dalam peran-peran kepemimpinan menjadikan kiai semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh yang dapat dengan mudah menggerakan aksi sosial. Oleh karena itu, kiai telah lama menjadi elite yang kuat. Ada dua faktor yang mendukung posisi kuat seorang kiai, yaitu:
   a. Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam menyebabkan kiai selalu punya pengikut, baik pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.
   b. Kiai biasanya berasal dari keluarga berada. Meskipun tidak sedikit kiai yang miskin pada saat ia mulai mengajarkan Islam di tunjukan oleh ukuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gedung pesantrennya, namun secara umum kiai berasal dari keluarga kaya. Dua faktor ini membuat kiai di pandang sebagai tokoh elite di desa.[9]

4. Zamakhsyari Dhofier dalam *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai).* Jakarta: LP3ES. 1994, berpendapat bahwa kiai berperan banyak dalam politik. Sejak semula kiai berada pada posisi mendua: di satu sisi ia adalah seorang tokoh agama, dan di sisi lain ia adalah tokoh politik.[10]

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[11]

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna sesuatu peristiwa interksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu data yang di peroleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik,

---

[9] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 98

[10] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai).* (Jakarta: LP3ES. 1994), 7

[11] Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan dalam bentuk kualitatif. Dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang di teliti dalam bentuk uraian naratif. Dalam penelitian ini akan di peroleh gambaran mengenai peran politik kyai di pedesaan.

1. Sumber Data

Secara sederhana sumber data dapat diartikan sebagai tempat atau asal muasal data diperoleh atau dengan kata lain sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.[12] Adapun sumber data dalam penelitian ini, meliputi; kepala desa guna mengetahui gambaran umum/profil obyek penelitian, pemilih untuk mengetahui aspirasi mereka, serta dokumentasi desa yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah metode atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data.[13] Sedang instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.

Sebenarnya ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang dapat diterapkan dalam penelitian. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan penulis maka metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara (interview)

---

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998, cet. Ke-11), 114

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara[14]

Bentuk wawancara yang di gunakan adalah *"semi structured"*. Dalam hal ini mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah tersetruktur, kemudian satu persatu di perdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang di peroleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Suharsimi Arikunto,1998).

Interview atau wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang makna kepemimpinan dan keterlibatan kyai dalam proses pemilihan kepala desa di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

b. Observasi

Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomen-fenomen yang diselidiki.[15]

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap letak geografis, fasilitas yang ada di desa Tunggalapger sebagai kelengkapan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang

---

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* 144
[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, ed. 12 (Jakarta, Andi Offset, 2001), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan., notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[16]

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang berkaitan profil desa yang diteliti.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan cara analisis atau pedoman analisis yang digunakan menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[17]

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[18]

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* 149
[17] Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 103
[18] Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

a. Untuk menjawab permasalahan pertama dari rumusan masalah di atas, yaitu tanggapan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan kyai, digunakan teknik analisa diskriptif.

b. Untuk menjawab permasalahan kedua dari rumusan masalah di atas, yaitu tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan kyai dalam pilihan kepala desa, digunakan teknik analisa analisa diskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahsan agar runtut, jelas, dan mudah dipahami oleh siapapun dari satu bab ke bab berikutnya. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan. Pada bab ini penulis mencoba untuk memberikan pemahaman awal dengan cara membeberkan secara panjang lebar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu Kajian Pustaka. Bab ini merupakan kajian berbagai akar pengertian dan bangunan teori yang meliputi kajian Pilkades dan Kyai dan Politik.

Bab III, yaitu berisi mengenai gambaran umum Desa Tunggalpager Pungging Mojokerto yang meliputi letak dan keadaan geografis; sejarah dan proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangannya; struktur organisasi; keadaan sosio kultural dan ekonomi serta sosio religius dan keadaan sarana dan prasarana.

Bab IV, Penyajian Data dan Analisis, yang merupakan penyajian data-data yang diperoleh di lapangan penelitian dan analisis yang meliputi : tanggapan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan kyai dan tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan kyai dalam pilihan kepala desa.

Bab V, yaitu Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pilkades

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat **Pilkades**, adalah adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.[1]

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan *transfer* kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu *moment* dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

---

[1] www.Wikipedia.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari *moment* itu pula, pencerahan dapat dilakukan. Dimana arahnya yaitu menguak tentang pemahaman demokrasi. Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 Kepala Desa nantinya harus mampu mengimbangi laju perkembangan pemerintahan. Artinya profesionalitas seorang Kepala Desa jauh sekali lebih penting jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Kepala Desa dituntut mempunyai inisiatif untuk mengoptimalkan potensi desa, tertib administrasi, akuntabel (bertanggung jawab) dengan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan prosedurnya.[2]

Dengan kata lain kekuasaan yang diperoleh Kepala Desa harus melalui kompetisi politik yang sehat dan terbuka, sehingga menjadikan dinamika politik lebih demokratis. Sebaliknya, harus dihindari perilaku politik yang mengarah ke hegemoni politik yang justru seringkali menggunakan cara-cara yang bersifat represif yang pada akhirnya mematikan aspirasi rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan:

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

---

[2]http://mbangun-desa.blogspot.com/2010/02/pilkades-sarana-mewujudkan-demokrasai.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
4. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
5. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
6. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
7. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
8. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
10. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk sate kali masa jabatan berikutnya.[3]

Dalam proses pilkades, semua warga yang telah dewasa dan berhak memilih pasti juga memiliki hak untuk dipilih. Bila ada aturan dan undang-undang yang hakekatnya tidak sejalan dengan hak memilih dan dipilih, bukan hak warga yang disunat, tetap peraturan dan undang-undang seyogyanya disesuaikan dengan kepentingan warga.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok

[3] PP RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

B. Tinjauan Tentang Kyai

1. Pengertian Kyai

Di Indonesia berbagai istilah lokal di gunakan untuk menunjukan berbagai tingkat keulamaan, dan istilah yang paling di gunakan untuk menunjukan berbagai tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kyai.

Istilah *kyai, bindere, nun, ajengan,* dan *guru* adalah sebutan yang semula diperuntukkan bagi ulama tradisional di pulau Jawa, walaupun sekarang ini kyai digunakan secara generik bagi semua ulama, baik tradisional maupun modernis, di pulau Jawa maupun di luar Jawa. Istilah *ustadz*, yang dulunya menjadi tanda pengenal ulama modernis atau ulama kalangan masyarakat Arab di negeri kita, sekarang juga sudah masuk dalam lingkungan pondok-pondok pesantren. Memandang dunia keulamaan dari sudut pandang terminologi yang digunakan seperti itu, itu saja sudah mengharuskan kita untuk melakukan pembagian para kyai berdasarkan macam-macam tolok ukur.[4]

Menurut Endang Turmudi kyai dapat di bedakan menjadi empat kategori yaitu kyai pesantren, kyai tarekat, kyai politik dan kyai panggung sesuai dengan

---

[4] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa.* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Cetakan Pertama (1). 1999), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam.[5] Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang kyai dapat di golongkan lebih dalam satu kategori. Dari empat kategori tersebut kyai dapat di bagi menjadi dua kategori lebih besar dalam kaitannya dengan pengikutnya, yaitu:

a. Kyai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang lebih luas dari pada kyai yang masuk kategori kedua. Kategori ini terdiri atas:

   1) Kyai Pesantren, kyai ini memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dan kyai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kyai. Ketika orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang kyai maka secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa kyai adalah orang yang patut diikuti dan seorang pengajar yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Santri yang menyelesaikan pendidikan di suatu pesantren dan kemudian menjadi kyai maka mereka juga membangun jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan kyai pesantren di mana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan kepemimpinan pesantren.

   2) Kyai Tarekat, kyai ini memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kyai tarekat adalah sebuah lermbaga

[5] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formal, para pengikut kyai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut ini bisa lebih banyak dari pada pengikut kyai pesantren karena melalui cabang-cabang di berbagai kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut tarekat.

b. Kyai yang menyebarkan dan merngembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Kyai ini terdiri atas kyai panggung dan kyai politik.

   1) Kyai Panggung, kyai ini mempunyai pengikut yang mungkin tersebar di seluruh kabupaten-kabupaten lain. Namun demikian, hal ini dapat terjadi karena hanya kyai panggung yang populer saja yang bisa di undang memberikan ceramah di kabupaten lain. Kebanyakan kyai panggung bersifat lokal dalam arti hanya di kenal oleh umat Islam di daerahnya saja.

   2) Kyai Politik, kyai ini lebih merupakan kategori campuran. Ia merujuk kepada kyai yang mempunyai concern untuk mengembngkan NU secara politis. Pengembangan NU dalam kurun waktu yang lama di kelola oleh kategori kyai ini yang tidak mempunyai pengikut seperti kyai lain.[6]

Berdasarkan latar belakang pendidikannya kyai dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kyai Tradisional, yaitu kyai yang mengambil pendidikan Islam di pesantren tradisional. Kyai tradisional biasanya memiliki pengetahuan Islam lebih banyak dari kyai modern.

---

[6] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan.*, 21-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kyai Modern, yaitu kyai yang pengetahuan Islamnya di peroleh dari lembaga pendidikan Islam modern, biasanya memiliki metodologi pengajaran yang lebih baik dari pada kyai tradisional. Kepemimpinan seorang kyai modern berbeda dengan kyai tradisional. Ikatan emosional antara kyai modern dengan santrinya kurang begitu kuat. Namun demikian beberapa kyai modern masih sanggup menarik ikatan emosional para santrinya sejauh ia di dukung oleh faktor-faktor lain, seperti garis keturunan kyai atau lembaga-lembaga tertentu yang diikutinya

2. Kepemimpinan Kyai Dalam Masyarakat

Sebagai pemimpin spiritual masyarakat, posisi kyai sangat dekat dengan masyarakat pedesaan lapisan bawah.[7] Petuah-petuahnya diikuti, sebab ia juga dianggap sebagai pewaris Nabi, dimana sifat-sifat kenabian seperti kejujuran, kepandaian, dapat dipercaya dan sebagainya dianggap melekat pada dirinya yang dituntun oleh ajaran Islam.[8] Ia telah menjadi contoh ideal bagi pengikut dan masyarakat sekitarnya yang menempati posisi terhormat dihati mereka.

Mengenai hal ini telah dituliskan oleh Sukardi sebagai berikut :

> sering kali terjadi bahwa apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh pimpinan tersebut menjadi semacam ketentuan atau instruksi yang perlu dilakukan oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya apa yang dikatakan "tidak" oleh orang yang dianggap pimpinan juga mungkin menjadi larangan oleh masyarakatnya.[9]

---

[7] Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.tt), 29

[8] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* 102

[9] Sukardi. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan.* (Yogyakarta: Usaha Keluarga, 2006), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, posisi seorang kyai menjadi sangat strategis dengan berbagai sifat dan perilaku yang mereka jalankan. Itu semua sebenarnya telah menjadi sumber kekuasaan kyai yang memungkinkan mereka dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya membentuk suatu otoritas mutlak, sebab menurut Nurcholis Madjid dalam Qomar, antara kepemimpinan kharismatik dengan sifat dasar demokrasi tidak dapat bersatu. Kepemimpinan karismatik cenderung melahirkan pemimpin-pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang bersifat absolut.[10]

Endang Turmudi, menjelaskan bahwa seorang kyai seperti halnya kyai pemimpin tarekat (mursyid), dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin kharismatik, karena mereka dianggap orang suci dan kepada mereka banyak orang yang meminta barakah. Seorang kyai dapat disebut sebagai seorang pemimpin kharismatik, sebab kekuatan pribadinya diakui oleh santri dan masyarakat. Kekuatan adikodrati yang diakui oleh orang lain, sebab mereka meyakini, tidak mungkin dapat terbentuk begitu saja anggapan tersebut, jika kualitas kealiman tidak mampu mengimbangi. Kualitas kealiman secara sempit dapat diartikan pintar secara ilmu pengetahuan agama dan berakhlak sesuai ajaran agama. [11]

Dhofier mengemukakan, bahwa kedalaman ilmu kyai lebih merupakan faktor utama yang menjadikan kyai tersebut semakin diakui. Kyai yang disebut

---

[10] Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi,* 40-41
[11] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan.*, 1119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alim bila ia benar-benar memahami, mengamalkan dan memfatwakan kitab kuning, sehingga kyai yang demikian ini menjadi panutan bagi santri, bahkan masyarakat Islam secara luas.[12] Kepandaian dan pengetahuan yang luas tentang Islam menyebabkan kyai selalu mempunyai pengikut, baik para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di sekitar rumahnya.

Kyai kharismatik dapat diukur melalui silsilah dan dari luas pengaruhnya (*zone influence*). Jika seorang kyai berasal dari garis keturunan kyai besar, maka kyai itu diyakini memiliki kharisma. Demikian juga, kalau alumninya tersebar dimana-mana, maka ia biasanya juga akan diposisikan sebagai kyai kharismatik. Kedua faktor tersebut bukan merupakan faktor utama bagi pembentukan kharismatik kyai, tetapi dalam berbagai hal sangat tergantung oleh berbagai macam kebijakan yang ia keluarkan guna memperkokoh eksistensi pesantren.

Seperti diungkapkan oleh Dhofier, seorang kyai kewibawaan kharismatiknya akan pudar atau bahkan hilang, ketika ia tidak mampu mendukung tegak ajaran Islam, maka dipastikan petuah-petuahnya tidak lagi menjadi nasehat ampuh bagi santri dan masayarakat sekelilingnya. Kata kuncinya disini, sebagai penjaga moral santri dan masyarakat, maka ia harus bisa memberikan contoh sosok yang bermoral di hadapan pengikutnya. Dalam akronim masyarakat Jawa sosok pemimpin yang tidak mampu mempertahankan

---

[12] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai).* (Jakarta: LP3ES. 1994), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moralnya sering disebut dengan sebutan, "Jarkoni", yang merupakan kepanjangan dari "iso ngaja, nanging ora iso nglakoni". Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya yaitu "bisa memberikan nasihat-nasihat atau petuah-petuah, tetapi dia sendiri tidak bisa menjalankan dan mengamalkan nasihat-nasihat tersebut". [13]

Kebanyakan kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu *"kerajaan kecil"*, dimana kyai merupakan suatu sumber kekuasaan mutlak dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren[14]. Santri yunior maupun santri senior tidak ada yang berani menentang keputusan dan kehendak kyai.

Menurut Endang Turmudi, kedudukan kyai bersifat superioritas dan santri berada pada kedudukan yang bersifat subordinasi. Tanda subordinasi ini bisa ditunjukkan dengan mencium tangan kyai. Mencium tangan kyai secara kultural mengisyaratkan penghormatan yang tinggi.[15]

Kyai sebagai raja kerajaan kecil kedudukanya dapat dibenarkan, sebab lingkungan pesantren adalah kawasan yang tertutup. Kalau penyebaran Islam pada mulanya mengambil posisi strategis di daerah pesisir yang merupakan pelabuhan perdagangan, kelihatanya pada perkembangan selanjutnya tidaklah demikian. Banyak pondok pesantren didirikan di daerah-daerah pedalaman pedesaan. Mungkin saja hal ini juga bertujuan untuk membatasi akses informasi yang dapat merusak tradisi pondok pesantren. Ada kalanya pesantren melarang

---

[13] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren,* 71
[14] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren.,* 56
[15] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

santri-santrinya untuk membawa peralatan elektronik dari rumah. Televisi, radio, handphone, bahkan majalah dan surat kabar ada yang dilarang untuk didistribusikan ke dalam pondok pesantren.

Peralatan elektronik dan surat kabar hanya diperbolehkan untuk diakses orang-orang tertentu, termasuk pengurus. Tanpa seijin kyai tidak mungkin pihak luar dapat memaksakan kepentinganya ke dalam pesantren, sekalipun itu adalah pemerintah.

Kyai sebagai raja kerajaan kecil, merupakan figur sentral yang memiliki otoritas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pendidikan pesantren.[16] Segala bentuk kebijaksanaan pendidikan yang menyangkut formal kelembagaan berikut penjenjanganya, kurikulum yang dipakai sebagai acuan, metode pengajaran, dan pendidikan yang diterapkan, keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas diluar, penerimaan santri baru maupun secara global sistem pendidikan yang diikuti adalah wewenang mutlak kyai Dengan demikian, politik pendidikan dalam pondok pesantren merupakan pikiran dan gagasan kyainya. Keberagaman suatu pondok pesantren dapat dilihat dari perbedan selera kyai yang memimpin tersebut.

Posisi kyai yang serba menentukan tersebut, pada akhirnya akan menyumbangkan terbangunnya otoritas mutlak. Kekuasaan mutlak ini barangkali harus demikian, sebab kekuasaan harus berada pada satu orang yang

---

[16] Muthohar, Ahmad. *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren Ditengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan (Ikhtiar Memotret & Mencari Formulasi Baru Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Berbagai Ideologi Pendidikan Kontemporer)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan segala kebijakan yang diambil tidak berbenturan satu sama lainnya. Berkaitan dengan penentuan policy pendidikan, lebih-lebih menyangkut aspek managerial, pihak lain hanyalah sebagai pelengkap. Kalaupun ada ustadz dan pengurus yang mengurusi roda pendidikan, itu sebatas berada di bawah skenario konsep yang telah ditentukan oleh kyai. Dalam pesantren, kyai adalah pemimpin tunggal yang memegang wewenang hampir mutlak.

Dibandingkan dengan elite lokal yang lain seperti para petani kaya, kyai yang memimpin pesantren punya posisi yang lebih terhormat. Hal ini telah menjadikan kyai sebagai pemimpin dalam masyarakat dan kepemimpinannya tidak hanya pada wilayah agama tetapi meluas pada wilayah politik. Keberhasilan kyai dalam peran-peran kepemimpinan menjadikan kyai semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh yang dapat dengan mudah menggerakan aksi sosial. Oleh karena itu , kyai telah lama menjadi elite yang kuat. Ada dua faktor yang mendukung posisi kuat seorang kyai, yaitu:

a. Kyai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam menyebabkan kyai selalu punya pengikut, baik pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kyai biasanya berasal dari keluarga berada. Meskipun tidak sedikit kyai yang miskin pada saat ia mulai mengajarkan Islam di tunjukan oleh ukuran gedung pesantrennya, namun secara umum kyai berasal dari keluarga kaya.[17]

Dua faktor ini membuat kyai di pandang sebagai tokoh elite di desa. Untuk memperkuat hubungan dengan para santrinya, seorang kyai tidak jarang mengijinkan sebagian mereka yang berasal dari keluarga miskin untuk bekerja di ladangnya. Umum di ketahui bahwa seorang calon kyai sering kali memiliki apa yang di maksud ilmu laduni yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa belajar. Pengetahuan seperti ini yang mungkin mendahului kekyaian seseorang atau muncul setelah ia menjadi kyai sehingga memberi legitimasi bagi kepemimpinan seorang kyai.

Hubungan antara kyai dan masyarakat mirip dengan hubungan antar ulama atau orang suci dalam masyarakat dunia Islam lain.[18] Hal yang juga menarik berkaitan dengan peran sosial kyai adalah adanya indikasi bahwa, ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kyai. Perbedaan persepsi teologis para kyai memperlihatkan adanya perbedaan perilaku sosial politik yang diperankannya. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dapat diamati pada beberapa hal seperti :

---

[17] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren,* 24

[18] Martin van Bruinessen. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik.* Yogyakarta: Bentang Budaya. 1998), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Di tengah perubahan sosiokultural masyarakat Indonesia jhususnya dalam usaha merespon momentum reformasi secara eurofia, perilaku sosial politik diperankan pada kyai memperlihatkan adanya perbedaan kognisi yang dimilikinya.;
b. Jika teori kasb dipersepi sebagai pemberian porsi lebih bersar terhadap qadariyah, maka perilaku sosial kyai meninggi, demikian pula sebaliknya ;
c. Persepsi teologis serta perilaku sosial politik kyai tertentu tidak secara otomatis menghasilkan peran perubahan pada masyarakat sekitarnya. Kenyataan ini terutama lebih diakibatkan oleh karena adanya pertentangan antara medan politik dalam diri kyai dan medan politik yang berkembang diluar diri kyai (masyarakat). [19]

Hubungan antara kyai dan masyarakatnya diikat oleh hubungan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang mempengaruhi aksi-aksi kyai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi, karena kyai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah-masalah spirtual tetapi mencakup aspek kehidupan yang lebih luas, maka para penduduk juga menganggap kyai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sistem nasional. Keberhasilan dalam menunjukkan peran penting tersebut mengarah hampir tidak terelakkan pada penempatannya tidak hanya sebagai

[19] Miftah Faridl, *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007,* 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang mediator hukum dan doktrin Islam tetapi juga sebagai kekuatan suci itu sendiri.[20]

Menurut Abdurrahman Wahid, ada 4 (empat) kelemahan kepemimpinan yang bersifat mutlak dan berkharisma.

Pertama, munculnya ketidakpastian dalam pengembangan pesantren yang bersangkutan, karena semua hal bergantung pada keputusan kyai. Seringkali suatu pengembangan perencanaan harus berhenti karena masalah-masalah pribadi kyai.

Kedua, sulitnya keadaan bagi tenaga-tenaga pembantu (termasuk calon pengganti yang kreatif) untuk mencoba pola-pola pengembangan yang sekiranya belum diterima oleh kepemimpinan yang ada. Upaya-upaya pengenalan program pendidikan, terutama yang belum ditradisikan tidak akan menembus pesantren tanpa restu kyai, biarpun seribu santri menyetujui program yang ditawarkan pihak luar misalnya, program itu tidak akan menembus pesantren, bila kyai pemimpinnya menolak tawaran itu. Kesulitan seperti ini, akan membuat terhentinya proses pemikiran yang merangsang mereka untuk merencanakan pola-pola pengembangan dirinya, sehingga lebih baik menunggu ajakan dari luar.

Ketiga, pola pergantian kepemimpinan berlangsung secara tiba-tiba dan tidak direncanakan, sehingga lebih banyak ditandai oleh sebab-sebab alami, seperti meninggalnya sang pemimpin secara mendadak. Pola pergantian pemimpin yang berlangsung secara mendadak itu, seringkali membawa perbedaan

---

[20] Clifford Geertz. *Abangan, santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa* (Terjemahan oleh Aswab Mahasin). (Jakarta: Pustaka Jaya,1981), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat dan saling perlawanan diantara calon-calon pengganti. Upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat itu, seringkali memakan waktu yang sangat panjang, hingga tegaknya pemimpin kharismatik yang baru.

Keempat, terjadinya pembauran dalam tingkat-tingkat kepemimpinan di pesantren, antara tingkat lokal, regional dan nasional. Seorang pemimpin pesantren yang telah mencapai peningkatan pengaruh sebagai akibat meluasnya daerah asal yang dijangkau oleh pemasukan santri ke pesantrennya, seringkali tidak dapat mengimbangi peningkatan pengaruh itu dengan peningkatan kualitas kepemimpinannya yang sanggup melintasi perbedaan tingkat-tingkat yang dihadapi, sebab cakrawala pemikirannya terkadang masih sangat bersifat lokal atau paling tinggi bersifat regional. [21]

Kharisma menurut Max Weber didefinisikan sebagai berikut (Reinhard Bendix dalam Wrong (Ed.)

> ..... kualitas tertentu dari seorang individu yang karenanya ia berbeda jauh dari orang-orang biasa dan dianggap memiliki kekuatan atau sifat supernatural, manusia super, atau setidaknya luar biasa. Kualitas ini dianggap tidak bisa dimiliki oleh orang biasa, tetapi dianggap bersumber dari Tuhan, dan atas dasar itu, individu yang bersangkutan diperlakukan sebagai pemimpin. [22]

Akan menjadi jelas kini persoalannya, apakah seseorang tersebut dapat dinyatakan sebagai pemimpin kharismatik atau bukan. Kyai dianggap sebagai orang yang luar biasa, sebab dia mempunyai massa yang meyakini keampuhan-

---

[21] Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi (Esai-Esai Pesantren).* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 180-181.

[22] Reinhard Bendix, *Refleksi Tentang Kepemimpinan Kharismatik.* Dalam Dennis Wrong (Ed.). ***Max Weber Sebuah Khazanah.*** Terjemahan A. Asnawi. Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keampuhan kyai, sehingga dengannya kyai tersebut oleh massa diberlakukan sebagai pemimpin. Keyakinan terhadap keampuhan kyai muncul karena adanya reproduksi dongeng yang dibuat dan pengalaman gaib massa yang disangkut pautkan dengan keampuhan kyai.

Kecenderungan untuk mengabsahkan kepemimpinan kyai, sehingga dapat membangun loyalitas hubungan terhadap pengikutnya, dapat kita lihat dari awal lahirnya kepemimpinan kyai tersebut.

C. Partisipasi Politik

1. Konsep Partisipasi Politik

Berbicara tentang partisipasi politik, tidak lepas dari konteks negara di mana warga negara itu hidup dan bertempat tinggal. Dengan demikian, pembicaraan tentang partisipasi politik akan menyinggung pula sistem politik dan negara yang bersangkutan berlangsung.[23]

Dalam sistem politik demokratis, permasalahan partisipasi politik mendapatkan perhatian utama. Ini mengingat bahwa sistem politik demokratis mengandaikan rakyat atau warga negara adalah pemilik mandat (*stakeholder*) dan pemerintah adalah pelaksana mandat (*agent*). Oleh karena itu, setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah harus mendapatkan legalitas dari sebagian besar atau seluruh warga negara. Partisipasi politik dianggap merupakan sarana

---

[23] Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan legalitas dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Artinya, semakin besar ruang partisipasi politik yang disediakan oleh sistem politik, maka sistem politik tersebut akan semakin demokratis.[24]

Akan tetapi, dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu karena perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tanggga daripada urusan politik. Sedangkan sosialisasi perempuan secara politis cenderung menggiring wanita mendapatkan status tertentu, tanpa usahanya sendiri. Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha untuk memperbesar akses mereka kepada kekuasaan. Oleh karena hanya dengan mempunyai akses besar, perempuan dapat mencapai jabatan-jabatan dalam politik dan pemerintahan. Namun, keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan dengan laki-laki ternyata tetap gagal mengimbangi hambatan-hambatan komulatif bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik.[25]

---

[24] Krishno Hadi dkk, *Perilaku Partai Politik* (Malang: UPT UMM Press, 2006), 18-19.
[25] Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas, mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.[26] Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Adapun pendapat dari para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang lebih mengenai partisipasi politik. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* memberikan pengertian mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. (*The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).[27]

Sedangkan menurut Keyth Fauls memberikan penegasan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif (*the active angagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintah. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan

---

[26] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 140.

[27] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 183-184. Di kutip dari Herbert McClosky, "Political Participation", International Encyclopedia of the Social Sciences, edisi ke-2 (New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972), XII, hlm. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. Sehingga dari pengertian ini partisipasi politik merupakan pengertian yang luas mencakup aktivitas mendukung atau terlibat dalam suatu pemerintahan serta aktivitas yang berkaitan dengan penolakan atau beroposisi kepada pemerintah.[28]

Dengan partisipasi politik kita akan mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.[29]

Sementara menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi.[30] Hal ini terjadi menurut Huntington dan Nelson, disebabkan oleh sejumlah alasan berikut:

Pertama, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip dari pada alam realitas.

Kedua, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya.

---

[28] Krishno Hadi dkk, *Perilaku Partai...* 19. Di kutip dari Faulks, *Political Sosiology, A Critical Introduction* (Eidenburgh: Eidenburgh University Press, 1999), 133.

[29] Roy C. Marcridis dan Benard E. Brown, *Perbandingan Politik*, Alih bahasa A.R. Henry Sitanggang (Jakarta: Erlangga, 1992), 349.

[30] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi.

Keempat, kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik.[31]

Di samping pendapat diatas, Lane menyatakan bahwa partisipasi politik juga memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial.
c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologi tertentukan.[32]

2. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti[33] kegiatan partisipasi politik dapat dikategorikan dengan sejumlah kriteria yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri.

---

[31] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi*..., 6-7.
[32] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik,* Alih bahasa Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 179.
[33] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.

Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang tidak wajar *(non konvensional)* dan berupa kekerasan (*violence*), seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus seperti lebih memilih kotak kosong dari pada memilih calon yang disodorkan pemerintah, huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.[34]

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap partisipasi dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis atau golongan putih (golput).[35]

Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori.

---

[34] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu*..., 141-142.
[35] Ibid,... 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

Kedua, spektator artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

Ketiga, gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Keempat, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.[36]

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni:

a. Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik, inilah bentuk konkret partisipasi aktif.
b. Non partisipan politik, inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok.[37]

Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidak pedulian ini semakin besar pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka

---

[36] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, 143.
[37] Ustman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin* (Solo: Era Intermedia, 2000), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan bahwa ketidak pedulian politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian masyarakat.

Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik, bentuk konkret sikap ini dapat dilihat pada tiga fenomena yaitu:

a. Ketidak pedulian politik yaitu tidak memberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepada segala yang datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidak mampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman.
b. Keraguan politik yaitu ketidak percayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktifitas politik adalah pekerjaan buruk.
c. Keterasingan politik yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi.[38]

Menurut Olsen partisipasi dapat dipandang sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan

[38] Ibid..., 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada lain), warga negara, marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem), dan orang yang terisolasikan (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).[39]

Dalam perspektif lainnya, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara. Karena seperti piramida, bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak dibawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilu.

Setingkat lebih maju dari tingkat pengamat yang terletak ditengah-tengah piramida partisipasi politik ialah kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktivitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial. Kelompok terakhir yang dibagian atas dari piramida partisipasi politik adalah aktivis. Warga yang termasuk dalam kategori

[39] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu…*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivis sedikit jumlahnya. Kegiatan politik pada jenjang aktivis ini adalah seperti menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Di samping itu, ada juga warga yang tidak termasuk dalam piramida ini, mereka adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Mereka ini oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang yang apolitis.[40]

Piramida partisipasi politik menurut Roth dan Wilson

3. Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik.

Tinggi rendahnya partisipasi warga dalam proses politik suatu negara setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kesadaran politik

[40] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia...*, 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang di maksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.[41]

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).[42]

Kedua faktor di atas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi

---

[41] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu…*, 144.

[42] Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004* (Jakarta: Visi Publishing, 2003),95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh faktor-faktor lain, seperti status ekonomi dan status sosial,[43] *afiliasi* politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Tingkat partisipasi warga dalam aktivitas politik juga tergantung tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat berwujud melalui :

a. Media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal.
b. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut.
c. Perasaan individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, lalu tumbuhlah kecenderungan kepada politik. Hal ini biasanya menyebabkan individu berkembang wawasan politiknya dan ikut andil dalam persaingan politik, sehingga mendorongnya untuk bergabung kepada suatu partai atau kelompok politik tertentu, atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
d. Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih dan berkesadaran

[43] Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat memecahkan problematikanya.

e. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memepengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis untuk berpartisipasi.[44]

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Jalbi bahwa partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan partisipasi politik. Faktor jenis individu laki-laki atau perempuan, juga berpengaruh besar terhadap partisipasi politik di sebagian masyarakat. Demikian juga taraf pendidikan, semua itu sering disebut sebagai faktor-faktor sosial.

b. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik, seperti kultur yang biasa di gambarkan oleh alegori rakyat di desa-desa yang ada di Mesir. Misalnya ungkapan "Yang penting bisa makan, sambil menuju ajal".

c. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui

---

[44] Ustman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik*..., 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan keapada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.[45]

Weber mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut :

a. Rasional bernilai, yaitu didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
b. Afektual dan emosional, didasarkan atas kebencian atau enthuasiasme terhadap suatu ide, organisasi, atau individu.
c. Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial.
d. Rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi.[46]

Menurut Huntington dan Nelson sebab-sebab partisipasi politik bahwa dalam teori, kecenderungan-kecenderungan dan kelompok-kelompok oleh adanya cara-cara alternatif yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.[47]

---

[45] Ibid..., 101-102.
[46] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi*..., 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab-sebab seseorang menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politiknya adalah berbagai motivasi yang ada pada kelompoknya dan dirinya, tentang bagaimana caranya agar tujuan-tujuannya tercapai melalui saluran-saluran politik yang ada. Adalah tidak terelakkan bahwa dalam mengaktualisasikan partisipasi politik dibutuhkan media. Huntington dan Nelson melihat basis partisipasi politik dapat bersifat individual atau kelompok. Basis kolektif terbagi atas lima bagian yakni kelas, kelompok komunal, lingkungan, partai politik, dan golongan.

a. Kelas adalah pengelompokan individu atas status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
b. Kelompok komunal diartikan sebagai pengelompokan individual karena persamaan ras, agama, bahasa, dan etnis.
c. Lingkungan adalah individu-individu yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
d. Partai politik adalah individu-individu yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif.
e. Golongan diartikan sebagai individu-individu yang dipersatukan olehinteraksi yang terus-menerus dan intens satu sama lain, salah satu manifestasinya berupa pengelompokan patronklien. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik ini dapat terwujud dengan dalam pelbagai bentuk, namun hal yang menjadi semestinya menjadi pertimbangan utama adalah

[47] Samuel P. Huntington, dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik...*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektifitas dan efisiensi cara dan alternatif dari bentuk partisipasi politik yang dipilih.[48]

4. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekwensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberi suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlahnya orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan ini sebagai aktifis politik yang mencakup antara lain menjadi pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Suatu bentuk partisipasi politik agak mudah di ukur intensitasnya, ialah dengan melihat perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga yang berhak mamilih.

Ahli-ahli politik sering membicarakan berbagai bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan fungsionalisasi demokrasi yang stabil secara efektif. Kebanyakan diskusi ini menegaskan bahwa mayoritas partai-partai menerima undang-undang kompetisi politik yang tertera di dalam konstitusi, hukum dan kebiasaan, dan tujuan serta metode mereka adalah salah satu atau beberapa dari

[48] Kamaruddin, *Partai Politik*..., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai besar yang mendapatkan dirinya eksis di dalam minoritas atau oposisi yang mengandung resiko yang dapat di terima. Konsepsi informal tentang karakteristik mayoritas dan oposisi dalam demokrasi yang yang efektif secara tidak langsung menyatakan adanya perasaan yang tidak umum, bahwa ia menganggap adanya perasaan partisan. Di dalamnya termasuk sikap memihak, keyakinan dan perasaan tentang arah tindakan politik yang layak, membantu beberapa kelompok dan mnentang yang lainnya.[49]

Seperti yang telah kami kemukakan, partisipasi politik adalah suatu usaha terorganisir para warga masyarakat untk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Bentuk partisipasi politik dapat diwujudkan dalam usaha-usaha untuk pembuatan keputusan politik, pemberian suara ataupun hak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam kenyataannya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil atau minoritas warga negara saja. Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa elitlah yang menguasai dan mengendalikan kekuasaan tersebut tidak sama di setiap negara, ataupun daerah bahkan bervariasi.

Jika elit yang berkuasa tersebut bisa menempatkan diri dan berfungsi secara proporsional, barang kali tidak menimbulkan permasalahan yang berarti. Tetapi sering kali menimbulkan masalah serius, seperti adanya kecenderungan kelompok elit untuk menolak atau paling tidak membatasi kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik. Berbicara soal

---

[49] Gabriel A. Almond dan Sidney verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara,* Alih Bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Bumi Angkasa, 1990), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi politik, dirasakan kurang lengkap jika tidak disertai pertimbangan yang jelas tentang bagaimana partisipasi politik itu diwujudkan, atau lewat cara-cara apa saja partisipasi itu bisa dilaksanakan dengan efektif.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang normal atau sudah umum dalam demokrasi modern adalah meliputi:

a. Aktifitas pemberian suara (votting)
b. Diskusi politik
c. Kegiatan kampanye politik
d. Bergabung dalam kelompok kepentingan (seperti masuk partai politik)
e. Ataupun melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif.[50]

Adapun tipe-tipe dari partisipasi politik masyarakat antara lain:

a. Partisipan terbuka adalah para responden yang mengungkapkan ketidak acuhanterhadap perkawinan antar partai, yang dijelaskan keterlibatan dirinya sendiri secara emosional dalam konteks pemilihan. Partisipan terbuka ini dilibatkan dalam pemilihan tetapi tidak sedemikian penuh, karena mereka berusaha memutuskan hubungan dengan anggota-anggota partai oposisi.
b. Partisipan yang apatis nampaknya kontradiktif untuk menyatakan partisipan yang apatis, tetapi mereka adalah para responden yang memilih salah satu partai besar, yang menyatakan ketidak acuhan terhadap perkawinan antar partai dan mengingkari terhadap ketiga perasaan terhadap pemilihan yang

[50] Cheppy Hericahyono, *Ilmu Politik...*, 180-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disajikan dalam interview kita (seperti marah, senang, dan masa bodoh). Mereka pemilih yang acuh tak acuh, yang terdapat disemua lapisan masyarakat, yang memberikan suara dan pilihannya.

c. Partisipan yang bersemangat adalah para responden yang prihatin terhadap perkawinan antar partai dan secara emosional terhadap pemilihan. Mereka secara tegas terpisah dari partai saingannya dan secara emosional terlibat dalam konteks pemilihan.[51]

5. Partisipasi Sebagai Akibat dari Sosialisasi

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, di mana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya,

[51] Almond dan Verba, *Budaya Politik*..., 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik.[52]

Ada beberapa defenisi mengenai konsepsi sosialisasi yang berkisar pada keberadaanya sebagai proses instruksi, penanaman dan pengajaran, atau bahwa ia adalah proses untuk mendapatkan sesuatu.

Menurut David F. Aberle dalam dalam *Culture and Socialization* menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkahlaku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan termasuk ilmu pengetahuan, motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan dan yang terus berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan masih harus terus dipelajari. [53]

Gabriel A. Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu genarasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.[54]

Sementara itu tujuan sosialisasi politik menurut Ghanim adalah untuk mengembangkan individu sebagai person politik atau pribadi politik. Yakni

---

[52] Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 135-136.

[53] Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia: Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: Penerbit SIC kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya, 1998), 67.

[54] Ibid,... 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah orientasi yang terbentuk dalam diri individu untuk menghadapi dunia politik, termasuk di dalamnya pandangan tentang peran politiknya secara khusus.

Sosialisasi politik sebagai kegiatan yang bertujuan membentuk kepribadian politik, dalam arti bahwa seseorang memperoleh orientasi politik yang memiliki tiga unsur yakni nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mendasar, pengetahuan dan informasi serta perspektif-perspektif politik, serta perasaan dan emosi berikut orientasi-orientasi politik. Oleh sebab itu, ia merupakan proses dimana perubahan kultur tertentu menuju orientasi dan praktek politik terjadi.

Partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik mensyaratkan adanya sosialisasi politik yang harus dialami oleh setiap individu. Karena tanpa adanya sosialisasi politik tidak akan mengakibatkan terjadinya partisipasi politik. Pengalaman yang diperoleh melalui sosialisasi politik akan menciptakan perilaku dan orientasi individu dalam aktivitas politik, di samping menentukan sejauhmana partisipasi politiknya.

Easton dan Dennis mengutarakan tahapan dalam proses sosialisasi politik, yaitu :

a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, anak, presiden, dan polisi.
b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu pejabat swasta dan pejabat negara.[55]

---

[55]Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*..., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rendahnya kualitas partisipasi warga negara Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang rendah menyebabkan rendahnya pemahaman politik yang mereka miliki. Rendahnya intensitas sosialisasi tersebut dapat disebabkan oleh budaya politik maupun non politik yang tidak menguntungkan mereka.

Budaya politik dan non politik yang tertanam langsung sejak masa kanak-kanak, baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar keluarga, menghasilkan sosialisasi politik dan pemahaman yang rendah kadarnya.

D. Peran dan Perilaku Politik Kyai

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya.

Abdul Munir Mulkan melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.[56]

Setiap manusia pasti memiliki perilaku (tindakan) tersebut, yakni suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi dan juga fungsi kognitif dari manusia. Menurut T.Parson

---

[56] Abdul Munir Mulkan, "*Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*," Rajawali Press, Jakarta, 1989, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Soekanto, salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.[57]

Sementara Jalaluddin Rakhmat, mendefinisikan tindakan sebagai hasil komulatif seluruh proses pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis dan efek dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia.[58]

Dalam konteks demikian, perilaku politik tidak hanya ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang bisa disebut peradaban politik. Artinya, perilaku politik tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau tentang ideologi negara yang sedang dianut di masyarakat tersebut serta interaksi yang muncul antara masyarakat, individu dan budaya politik tersebut.

Dalam situasi demikian, setiap masyarakat kemudian akan diperintah oleh sekelompok kecil orang (elit) yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Dalam konteks ulama, dapat dikatakan bahwa mereka berada dalam salah satu lapisan masyarakat di atas yakni kelompok elit.

---

[57] Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, 15.
[58] Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di pedesaan peran elite agama dan elite penguasa cukup menonjol dalam perubahan sosial. Argumentasi posisi strategis elite agama dapat dicermati di bidang sosial keagaman, pendidikan, pengembangan masyarakat dan bidang politik. Tradisi pesantren dalam perubahan sosial politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tradisi pesantren sebagai *basis cultural* dan tradisi pesantren senagai mediator antara kepentingan partai politik dengan para pendukunngnya. Tradisi yang kedua ini menempatkan posisi politik kyai menjadi signifikan untuk di perebutkan partai politik dalam rangka memperoleh dukungan suara.

Sebab menurut Max Weber ada tiga jenis kekuasaan (otoritas) dalam sebuah masyarakat, yaitu 1). kekuasaan tradisional, dimana tuntutan keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno; 2). kekuasaan yang rasional atau berdasarkan hukum (legal), yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah; dan 3). kekuasaan kharismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang dan dari corak tata tertib yang diperlihatkan olehnya. [59]

Endang Turmudi mengkategorikan kyai sebagai pemimpin kharismatik, sebab kyai adalah agen monopoli transfer barakah, dimana orang lain tidak bisa

---

[59] Kartodirdjo, Sartono (Ed.). ***Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial.*** (Jakarta: LP3S, 1984), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikannya (luar biasa). Untuk mengkategorikan kepemimpinan kyai, maka akan lebih arif, jika kita meninjau kembali dari pengertian secara tekstual kepemimpinan kharismatik yang dinyatakan oleh Weber, sebab batasannya lebih umum, sehingga dapat diaplikasikan keberbagai jenis pemimpin, entah itu pemimpin revolusioner ataupun pemimpin pondok pesantren maupun institusi lainnya.[60]

Tradisi pesantren merupakan bentuk sistem sosial yang tumbuh di lingkungan pesantren melalui sistem kekerabatan yang di bangun kyai. Sistem kekerabatan yang di kembangkan kyai di bangun di atas landasan yang kuat melalui hubungan kekerabatan geneologi sosial kyai, jaringan aliansi perkawinan, geneologi intelektual, dan aspek hubungan antara guru murid atau kyai dengan santri yang tidak hanya di batasi pada lingkungan pesantren dan persoalan keagaman saja tetapi bisa keluar dari lingkungan pesantren.

Sebagai pemimpin Islam informal, kyai adalah orang yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini karena kyai adalah orang suci yang dianugrahi berkah, karena tipe otoritas ini berada di luar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari. Sehingga kyai dipandang mempunyai kelebihan yang luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping kelebihan personalnya otoritas kyai dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah di bentuk oleh kepedulian dan otoritasnya pada kepentingan-kepentingan umat Islam.

---

[60] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Posisi kyai telah memainkan peran peratara bagi umat Islam dengan memberi mereka pemahaman apa yang terjadi di tingkat nasional. Para penduduk desa yang biasa menyebut diri mereka orang awam, sadar bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat nasional. Hubungan yang dekat antara penduduk desa tersebut dengan kyai menempatkan kyai pada posisi sebagai penerjemah yang memberikan penjelasan dalam konteks agama dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa pada umumnya. Posisi menonjol para kyai ini lebih tampak ketika partai politik secara intens memasuki masyarakat jawa. Ini terjadi karena kyai sendiri adalah bagian dari elite politik, suatu posisi yang strategis dan diklaim mempunyai posisi kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam berbagai macam tantangan yang nyata dari kelompok-kelompok lain.

Sejak masa-masa awal kerajaan Islam, tampak para ulama memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Menurut Benda yang dikutip Dirdjosanjoto, para penguasa yang baru dinobatkan harus banyak bersandar kepada para ulama, guru mistik dan ahli kitab, karena merekalah yang dapat menobatkan para penguasa tersebut menjadi pangeran-pangeran Islam, mengajar dan memimpin upacara keagamaan, serta menjalankan hukum Islam terutama di bidang perkawinan, perceraian, serta warisan. Di bawah kesultanan Islam, karena sultan diakui sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa Islam, lembaga keagamaan mendapatkan pengakuan (*legitimate)* dan perlindungan penuh (*full protection*). [61]

Dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia terdapat kelompok elit yang memiliki kedudukan dan peran menentukan. Terdapat kaum bangsawan atau priyayi dan elit agama seperti ulama atau kyai yang keduanya sering disebut sebagai elit tradisional, yang berbeda dengan elit baru yaitu elit birokrasi dan kaum intelegensia.

Pada masa pasca kemerdekaan, muncul elit baru dari kalangan masyarakat Indonesia, baik pada Orde Lama lebih-lebih pada masa Orde Baru, yang tampil sebagai "*the ruling class*" dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Elit militer (tentara), elit birokrasi (pejabat pemerintah), pengusaha, cendekiawan (intelektual, intelegensia), menempati posisi-posisi, dan peran-peran strategis. Modernisasi dan pembangunan yang berlangsung makin cepat pada Orde Baru, telah melahirkan proses interaksi dan mobilitas sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan pada kaum elit pada khususnya yang memunculkan posisi-posisi dan peran-peran sosial baru.

Menurut Kuntowijoyo, pada masa pra kemerdekaan kaum priyayi dapat memiliki kedudukan dan peranan sebagai *abdi dalem* dan *ambtenaar*, kini muncul priyayi baru yaitu para pegawai negeri yang disebut sebagai elit birokrasi. Elit birokrasi bahkan banyak terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis.[62]

---

[61] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren.*, 35

[62] Kuntowijowo. *Pengantar Ilmu Sejarah.* (Yoyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1999), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi peranan yang dimainkan oleh kyai dalam kedudukan sebagai elit sosial-keagamaan masyarakat selain sebagai pewaris tradisi keagamaan juga pemberi arah atau tujuan kehidupan masyarakat yang mesti ditempuh memiliki nilai yang signifikan. Karena itu, ia lebih bersifat memberikan penyerahan terhadap masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi, peran-peran seperti itu sangat diperlukan, apalagi bagi masyarakat yang masih bersifat agraris.

Apalagi peran yang dimainkan oleh para kyai yang berada di pedesaan. Biasanya, mereka adalah guru agama, guru ngaji yang memiliki surau/langgar/musala, pengurus takmir masjid, dan pesantren yang kecil. Kelebihan kyai-kyai yang ada di pedesaan dengan kyai-kyai besar itu adalah keterlibatan mereka secara aktif dalam masyarakat. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada jarak fisik maupun psikis. Kyai-kyai besar dan pesantrennya saat ini menjadi komunitas tersendiri yang memiliki jarak dengan masyarakat luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Letak, Luas, Batas-batas dan Pembagian Wilayah

1. Letak Desa Tunggalpager

Secara administratif Desa Tunggalpager termasuk dalam wilayah kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto. Letak Desa Tunggalpager ada di bagian timur kabupaten Mojokerto.

2. Luas Desa Tunggalpager

Menurut data monografis statis Desa Tunggalpager tahun 2010, luas Desa Tunggalpager secara keseluruhan kurang lebih 5.662 km^2.

3. Batas batas Desa Tunggalpager

Secara administratif Desa Tunggalpager termasuk dalam wilayah kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto dengan batas-batas wilayah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jabotegal.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pungging.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Lebaksono.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Mojosari.

4. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Tunggalpager terdiri atas 7 dusun yang yang masing-masing dipimpin oleh satu kepala dusun. Pembagian dusun yang dijadikan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dusun Ketok

b. Dusun Wonogiri

c. Dusun Bedagas

d. Dusun Panjer

e. Dusun Jelak

f. Dusun Kojo

g. Dusun Panggreman

5. Perangkat Desa

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa Tunggalpager diperintah oleh seorang Kepala Desa dan aparat lainnya.

Dalam rangka membina dan menghimpun peran serta masyarakat dan untuk mewujudkan mekanisme pembangunan, maka pelaksanaannya dengan melalui sistem perencanaan dari bawah dengan menggunakan dan memanfaatkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

B. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Tunggalpager berjumlah 5.951 jiwa yang terdiri atas 2.872 jiwa laki-laki dan 3.079 jiwa perempuan (Sumber data monografis dinamis Desa Tunggalpager perkeadaan bulan Januari 2010).

C. Keadaan Sosial Budaya

1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradaban penduduknya. Penduduk Desa Tunggalpager sebagian besar adalah petani, buruh, karyawan, wiraswasta, pedagang, PNS, dan TNI. Dengan demikian sebagian besar penduduk Desa Tunggalpager adalah petani, karena sebagian besar wilayah di Desa Tunggalpager adalah daerah sawah.

Masyarakat Desa Tunggalpager secara keseluruhan berjumlah 5.951 Jiwa. Adapun data yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian Desa Tunggalpager selengkapnya sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Lapangan Pekerjaan Penduduk Desa Tunggalpager
Tahun 2010

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	25 orang
2	ABRI	9 orang
3	Wiraswasta	220 orang
4	Pedagang	52 orang
5	Petani	434 orang
6	Pertukangan	39 orang
7	Pensiunan	4 orang
8	Buruh / karyawan	124 orang
Jumlah		907 orang

Sumber : Dokumentasi Desa Tunggalpager 2010

2. Agama

Masyarakat Desa Tunggalpager merupakan masyarakat yang seratus persen memeluk agama Islam. Masyarakat dusun Panjer, dusun Bedagas, Wonogiri, dan Ketok adalah dusun tempat aktifitas agama yang masih fanatik. Hal ini terlihat dari kehidupannya yang masih religius dan adanya pondok pesantren yang berdiri di dusun-dusun tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di
Desa Tunggalpager **Kecamatan Pungging**
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2010

No	Agama	Pengikut	Keterangan
1	Islam	5951 orang	100 %
2	Kristen	- orang	0 %
3	Katolik	- orang	0 %
4	Hindu	- orang	0 %
5	Budha	- orang	0 %

Sumber : Dokumentasi Desa Tunggalpager 2010

Berdasarkan tabel di atas, baka dapat diperoleh gambaran bahwa penduduk Desa Tunggalpager mayoritas beragama islam .

3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat di gunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kemajuan suatu daerah.

Penduduk Desa Tunggalpager yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 264 jiwa, tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.107 jiwa, lulus Sekolah Menengah Pertama sebanyak 687 jiwa, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 983 jiwa, dan lulus perguruan Tinggi (PT) sebanyak 93.

4. Politik

Dalam kaitannya dengan partisipasi politik dalam sistem politik demokratis yang memposisikan rakyat atau warga negara adalah pemilik mandat (*stakeholder*) dan pemerintah adalah pelaksana mandat (*agent*). Oleh karena itu, setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan legalitas dari sebagian besar atau seluruh warga negara yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemilu legislatif.

Partisipasi politik warga Desa Tunggalpager dalam kaitannya dengan pemilu legislatif tahun 2008 untuk 5 besar dalam perolehan suara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Jumlah Perolehan Suara Dalam Pemilu Legislatif
Desa Tunggalpager **Kecamatan Pungging**
Kabupaten Mojokerto

No	Partai Politik	DPR RI	DPRD Propinsi	DPRD Kab
1	PKB	1300	1320	1840
2	Demokrat	742	769	737
3	PDI-P	581	583	545
4	PPP	239	294	234
5	Golkar	172	168	157

Sumber : Dokumentasi Desa Tunggalpager 2010

D. Sarana dan Prasarana Umum Desa

1. Jalan dan alat transportasi

Jalan sebagai jalur transportasi yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain atau wilayah satu ke wilayah lain yang ada di Desa Tunggalpager sepanjang 55,27 km belum di aspal dan sepanjang 24,20 km sudah di aspal.

Sedangkan alat transportasi yang paling banyak digunakan adalah sepeda motor, sepeda, becak, truk, *colt,* mobil pribadi, dan mobil dinas. Hal ini sangat membantu proses mobilisasi di Desa Tunggalpager.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fasilitas Pendidikan

Di Desa Tunggalpager terdapat dua buah Madrasah Aliyah dan 1 SMK, 2 buah Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP), 2 Madrasah Tsanawiyah, 1 satu buah Sekolah Dasar (SD), 2 buah MI dan 4 Taman Kanak-Kanak (TK/RA). Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren, Tempat Pembelajaran AlQur`an (TPQ), dan lembaga-lembaga Ketrampilan.

3. Fasilitas Ibadah

Fasilitas ibadah merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan rohani masyarakat. Di Desa Tunggalpager terdapat 5 masjid, dan 21 mushola. Dan masing-masing tempat ibadah tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Tunggalpager **Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2010**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5 buah
2	Langgar	21 buah
3	Gereja	- buah
4	Kuil/wihara	- buah

Sumber : Dokumentasi Desa Tunggalpager 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkades Di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) menjadi ikon baru dalam isu strategis integrasi sosial dan manajemen konflik pada parameter pelembagaan politik. Ada dua pendekatan yang dilakukan daerah dalam mengoptimalkan fungsi pilkades sebagai wahana demokratisasi di tingkat lokal. *Pertama*, daerah menerapkan model pilkades serentak. Dengan model itu, pelaksanaan pilkades diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai media pembelajaran demokrasi di tingkat desa. Cara tersebut diharapkan dapat meminimalkan ekses negatif yang menodai pelaksanaan pilkades, seperti praktik politik uang yang sering berkaitan dengan jaringan perjudian. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa praktik negatif semacam itu tidak sepenuhnya dapat dihapuskan. *Kedua*, daerah menekankan pada kualitas penyelenggaraan pilkades. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wajah demokrasi yang sebenarnya. Jauh lebih baik dari Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, karena pemilih benar-benar dapat memberikan pilihannya terhadap calon yang telah dikenal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak seperti pemilu legislatif, yang seringkali calon dengan perolehan suara terbanyak, harus mengalah terhadap nomor urut satu. Rakyat justeru disuguhi gambaran individu setiap tokoh yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka dapat menentukan pilihannya didasarkan pada pengenalan, pengetahuan dan pemahaman akan calon Kades yang bakal dipilihnya, dengan pemenang adalah pemimpin yang paling banyak dipilih warga.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa Tunggalapger dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang berkembang dan untuk mencapai tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, dan mewujudkan Desa yang mandiri.

Proses Pilkades ini juga menjadi wahana perpolitikan warga yang akan menentukan maju mundurnya desa Tunggalpager di masa depan. Ini artinya calon yang terpilih memiliki rasa tanggung jawab langsung kepada warganya. Kesalahan yang dilakukan oleh calon terpilih akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat sekitar.

Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu *moment* dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Hal ini juga diakui oleh Sutrisno ketua panitia Pilkades yang menyebutkan bahwa :

> "Pilkades itu ruwet. Banyak hal yang harus disiapkan seteliti mungkin, mulai penjaringan, seleksi calon sesuai dengan peraturan yang ada juga pelaksanaan pilihan. Kami tidak ingin seperti di desa lain, dimana panitia memihak salah satu calon sehingga menimbulkan demo dan tidak menerima hasil pilihan, karena calonnya merasa dirugikan."[1]

Pengakuan bapak Sutrisno ini mengindikasikan bahwa proses Pilkades kalau tidak dilakukan secara adil akan menimbulkan dampak dan keretakan sosial antar masyarakat yang masih terikat oleh ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Pada akhirnya akan membawa pengaruh pada perjalanan pemerintahan desa enam tahun ke depan.

Proses Pilkades ini juga merupakan pengejawantahan dan implementasi PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa.

---

[1] Hasil wawancara bapak Sutrisno, 2 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pilkades di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah PP nomor 72 tahun 2007 pasal 46 yang menyatakan:

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Sedangkan untuk proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diserahkan dan diatur oleh peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan PP nomor 72 tahun 2007 Pasal 53 yang menyebutkan:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pencalonan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

(5a) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), ternyata hanya terdapat seorang Bakal Calon Kepala Desa, maka proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan Bakal Calon Tunggal.

(1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan beberapa atau salah satu calon mengundurkan diri dan masih terdapat 2 (dua) orang calon atau lebih, maka proses pemilihan dilanjutkan dengan Calon Kepala Desa yang ada.

(2) Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) orang calon, maka diberlakukan ketentuan Pasal 11 ayat (5a) Peraturan Daerah ini.

Pada pemilihan Kepala Desa di Desa Tunggalpager kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diikuti seorang calon tunggal, yaitu M. Ma'ruf (Gus Ma'ruf) putra dari (alm) Kyai Hamdani.

Pada awalnya ada dua nama yang mencalonkan diri yaitu bapak Sunarto dan bapak Mulyadi. Akan tetapi semenjak kemunculan Gus Ma'ruf sebagai calon Kades yang akan meramaikan bursa pencalonan Kepala Desa Tunggalpager, mereka mengundurkan diri. Padahal persiapan yang mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan berdua sudah cukup lama kurang lebih dua bulan dan menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Tradisi di Desa Tunggalpager atau desa-desa sekitarnya, seseorang yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka dia harus berani menerima tamu para pendukungnya untuk sekedar *melekan* hampir setiap malam. Konsekuensinya para calon harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Tradisi *buka lawang* ini sudah sejak lama ada, dan fenomena ini sekaligus dijadikan tolak ukur penilaian bagi calon kepala desa dan warga.

Bagi calon kepala desa, dengan banyaknya warga yang kumpul dan bertamu ke rumahnya dijadikan ukuran dan parameter akumulasi dukungan warga kepada dirinya, meskipun hal itu tidak mutlak. Sedangkan bagi warga dijadikan alat untuk menilai baik buruknya, loman dan meditnya calon. Biasanya warga menilai dari jamuan yang dihidangkan, minuman dan ada tidaknya rokok. Bahkan bagi sebagian kalangan pemuda, situasi ini dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Mereka mendapatkan makanan, minuman dan rokok gratis, bahkan lebih ekstrem lagi mereka meminta uang untuk mabuk-mabukan.[2]

Dari diskripsi di atas, amatlah wajar jika kemunduran bapak Sunarto dan bapak Mulyadi dari pencalonan sebagai kepala desa memiliki alasan yang kuat. Melalui penuturannya kepada penulis, bapak Sunarto menyebutkan alasan pengunduran diri.

---

[2] Rangkuman hasil wawancara dengan bapak Afandi (Ketua Karang Taruna), 2 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bagaimana ya mas, rasanya segan untuk bersaing memperebutkan Kepala Desa dengan Gus Ma'ruf. Sebab Kyai Hamdani orang tua Gus Ma'ruf adalah guru ngaji saya sewaktu kecil sampai usia dewasa. Bahkan beliau sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Bila ada persoalan, saya sering minta nasehat dan masukan dari Yai Hamdani. Persoalan uang yang habis untuk perjamuan tamu-tamu saya yang datang hampir setiap malam selama kurang lebih dua bulan, anggaplah sebagai sadaqah". [3]

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Mulyadi sewaktu berhasil ditemui oleh penulis, beliau menuturkan:

> "Saya ini merasa sungkan saja jika berhadapan dengan Gus Ma'ruf, karena beliau juga sering membantu saya, apalagi dengan orang tuanya Yai Hamdani. Beliau sering saya undang untuk memberi ceramah di sini, juga terkadang saya *sowan* ke rumahnya untuk minta nasehat atas masalah yang saya hadapi"[4]

Dengan pengunduran diri kedua calon tersebut (bapak Sunarto dan bapak Mulyadi, secara otomatis maka calon Kepala Desa pada Pilkades di desa Tunggalpager menyisakan calon tunggal yaitu M. Ma'ruf.

Untuk menyiasati adanya calon tunggal, maka pihak panitia menyarankan kepada Gus Ma'ruf untuk mencalonkan isterinya sebagai calon pendamping (boneka). Hal ini sekedar untuk menghindari kemunduran proses pencalonan. Atas dasar ini, maka Gus Ma'ruf menyetujuinya dan menanggung seluruh biaya pencalonan tersebut.[5]

---

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto, 2 Juni 2010
[4] Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi, 10 Juni 2010
[5] Hasil wawancara dengan Madyani (sekretaris panitia), 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penetapan Jumlah Pemilih

Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pilkades di Tunggalpager adalah 5120. Jumlah tersebut merupakan daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia dengan mengacu pada Perda Kabupaten Mojokerto yang memberikan criteria bahwa pemilih pada Pilkades adalah mereka yang sudah atau pernah nikah (keluarga) dan atau sudah berusia 17 tahun.

d. Prosesi Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2007 yang dimulai pukul 08.00 tersebut, tepat pada pukul 14.00 berakhir. Setelah istirahat selama 30 menit, langsung dilakukan perhitungan. Pilkades diikuti dua calon yaitu M. Ma'ruf (dengan lambang Pisang) dan isterinya Hj. Siti Aminah (dengan lambang Mangga).

Hasilnya, tanda gambar pisang memperoleh 3.406 suara., tanda gambar mangga memperoleh 1.228 suara Surat suara rusak mencapai 117 buah. Dan warga yang tidak memberikan hak pilihnya adalah 369.[6]

Dengan hasil tersebut, maka panitia menetapkan M. Ma'ruf sebagai Kepala Desa terpilih dan syah melalui pemilihan yang langsung dan adil.

2. Gambaran Umum Eksistensi Kyai di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Berkaitan dengan eksistensi kyai, di desa Tunggalpager terdapat beberapa Kyai besar pendiri pondok pesantren, yaitu Kyai Hamdani (pendiri dan pengasuh

[6] Dokumentasi Desa Tunggalpager tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pondok pesantren Nahrul Ulum di dusun Wonogiri, sekarang sudah Almarhum), Kyai Maghfur (pendiri dan pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum di dusun Bedagas), Kyai Mahfud (pendiri dan pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum di dusun Ketok, sekarang sudah Almarhum) dan Kyai Abd. Ghofur (pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al Muhajirin di dusun Panjer).[7]

Kontribusi para kyai dalam memajukan desa Tunggalpager baik dalam aspek pendidikan khususnya pendidikan agama dan perekonomian warga sekitar cukup signifikan.

Hal ini diakui oleh Kepala Desa Tunggalpager Bapak M. Ma'ruf :

> "Para kyai memiliki sumbangan besar bagi kemajuan pendidikan di desa ini. Disamping memiliki pondok pesantren, para kyai juga mendirikan lembaga pendidikan formal seperti RA, MI, SMP I dan MA. Sehingga mereka memiliki andil besar dalam memajukan pendidikan di sini dan desa sekitara. Bahkan dengan adanya para santri yang menetap dan berasal dari daerah lain, memberi kesempatan kepada warga yang kebetulan dekat dengan pesantren untuk membuka warung-warung untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para santri, sehingga kehidupan perekonomian warga sekitar juga meningkat.[8]

Realitas ini juga diakui oleh Mbok Seniti ; "*Al hamdulillah mas, enten pondok. Kulo saget sadean, senaoso namum rujak kale goreng-gorengan. Sakderenge enten pondok, kulo nggih ngganggur*".[9] (*Al hamdulillah* mas, ada pondok. Saya bisa berjualan, meskipun hanya rujak dengan kue goring-gorengan. Sebelum ada pondok, saya menganggur).

---

[7] Sumber : Dokumentasi Desa Tunggalpager yang sudah diolah
[8] Hasil wawancara dengan Kades Tunggalpager Bapak M. Ma'ruf, 15 Juni 2010
[9] Hasil wawancara dengan Mbok Seniti, 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan mbok Seniti menunjukkan bahwa eksistensi pondok pesatren juga mampu mengangkat perekonomian daerah-daerah sekitarnya. Dari hasil observasi penulis juga menemukan adanya warung-warung yang berjualan untuk menopang kebutuhan para santri dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal, tercatat ada beberapa tingkat pendidikan formal seperti RA Nahrul Ulum dibawah naungan Pondok Pesantren Nahrul Ulum Wonogiri. RA Nurul Ulum, MI Nurul Ulum, SMPI Raden patah dan MA Nurul Ulum dibawah naungan Pondok Pesantren Nurul Ulum Bedagas. Bahkan pondok pesantren Al Muhajirin memiliki pendidikan kejuruan yaitu SMK Budi Utomo, disamping MA dan SMPI Al Muhajirin.

Keberadaan para kyai di Desa Tunggalpager juga memberikan kontribusi pada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Antara lain memberikan perintah kepada para santri untuk membantu warga sekitar dalam kerja bakti, bahkan sewaktu terjadinya peristiwa ninja juga ikut menjaga keamanan lingkungan beserta warga setempat dalam bentuk siskamling.[10]

Bahkan pada acara-acara peringatan hari besar Islam, pihak pesantren melakukan kerja sama dengan warga setempat untuk memperingatinya. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan kegiatan pengajian umum. Demikian pula bila ada tasyakuran atau hajatan oleh warga, sering para kyai terutama kyai Hamdani diundang untuk memberikan *mauidloh hasanah*.

---

[10] Hasil wawancara dengan bapak Tamim, 12 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek lain yang juga menunjukkan pengakuan warga terhadap keberadaan kyai adalah manakala ada seorang warga yang sakit, maka keluarga si sakit tidak segan-segan untuk meminta doa kepada para kyai agar anggota keluarga yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah SWT.

Hal ini sebagaimana diungkapkan bapak Marto kepada penulis bahwa: "Banyak warga sini yang *sowan* kepada kyai terutama kyai Maghfur untuk mencari obat agar keluarganya yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT melalui doa para kyai".[11]

Menurut hemat penulis, situasi ini hampir terjadi pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka mencari obat alternatif kepada para kyai atau orang lain yang dianggap memiliki kemampuan ghoib. Fenomena ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi sudah terjadi puluhan tahun yang silam. Dan kemampuan inilah yang menempatkan posisi seorang kyai pada tempat yang strategis untuk mempengaruhi masyarakat sekitar.

Implikasi posisi ini dalam wajah perpolitikan di desa Tunggalpager menciptakan budaya *sungkem* seorang pemimpin (kepala desa atau lurah misalnya) kepada kyai. Pada saat-saat menjelang pemilihan kepala desa misalnya dukungan dari kyai sangat mempengaruhi pendapatan suara. Calon yang tidak memperoleh dukungan salah satu kyai yang ada, ia akan merasa kurang pantas. Terkadang hal ini menyebabkan terjadinya calon tunggal didalam sebuah

[11] Hasil wawancara dengan bapak Marto, 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan kepala desa, kadang calon yang tidak mendapat restu dari kyai memilih mundur sebelum diadakannya pemilihan.

Dan biasanya calon yang berasal dari santri seorang kyai terkemuka akan banyak dipilih oleh masyarakat apalagi calon tersebut juga mendapat restu dari kyai tersebut. Hal ini disebabkan kepercayaan terhadap kyai masih sangat tinggi, bukan saja kharisma seorang pemimpin secara personal namun sudah mengarahkan kepada penilaian latar belakang, hubungan mereka dengan tokoh kharismatik (kyai).

Setelah menjadi pemimpin, budaya *sungkem* terhadap kyai tidak pernah ditinggalkan. Agar dukungan dari kyai tidak lepas, berapa upayapun dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kyai untuk mengalihkan dukungannya. Untuk melangengkan kekuasaan maka seorang pemimimpin berusaha meminta nasihat yang akan dijalankan didalam kebijakan politiknya.

Kenyataan ini secara implisit diungkapkan oleh bapak Toha warga dusun Wonogiri yang menyebutkan: "*Kulo sering ninggali pejabat sowan teng ndaleme Yai Hamdani, nopo malih enten acara pilihan, nopo pilihan lurah, pilihan DPR nopo lintune*"[12] (saya sering melihat pejabat datang ke kediaman Kyai Hamdani, apalagi kalau ada acara pemilihan, baik pemilihan kepala desa, DPR atau lainnya).

[12] Hasil wawancara dengan bapak Toha, 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Data

1. Kepemimpinan Kyai di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Kepemimpinan memuat dua hal pokok yaitu: Pemimpin sebagai subjek, dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya.

Masyarakat di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada umumnya memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan pendidikan masyarakatnyapun relative masih rendah. Dengan kehidupannya yang sederhana tersebut pola pikir mereka masih bersifat sederhana. Sehingga dalam segala pengambilan keputusan masih memperhatikan saran-saran dari pemimpinnya.

Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status sosial maka para ulama khususnya para kyai di desa menerima penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Kapasitas kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada wilayah agama tetapi juga sosial politik.

Keberhasilan dalam membangun *image* pada masyarakat sekitar dengan peran sosial keagamaan yang diemban para kyai yang diimplementasikan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku kehidupannya, menjadikan kyai semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh di desa Tunggalpager.

Kepatuhan masyarakat terhadap kyai yang ada di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang dianggap memiliki kelebihan dari orang lain, para kyai sering dimintai saran atau pendapat dalam persoalan-persoalan yang kerap kali muncul dalam wacana kehidupan sehari-hari.

Salah seorang responden menuturkan kepada penulis bahwa

> "Para kyai terutama yai Hamdani memiliki peran yang besar dalam memajukan pendidikan masyarakat di sini. Beliau tidak segan-segan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Beliau juga tidak membedakan orang yang datang meminta bantuan".[13]

Keterkaitan kepemimpinan kyai dan kharisma yang dimilikinya merupakan dua hal yang saling menguatkan. Kekuatan kepemimpinan kyai di Desa Tunggalpager yang didukung dengan kharisma akan membuat masyarakat semakin patuh. Kharisma yang dimilikinya akan membuat warga sekitar merasa segan untuk menolak ajakan atau himbauan. Mereka menganggap para kyai memiliki kelebihan akan hal-hal ghoib yang masih kental dalam pola pikir mereka.

Kharismatik para kyai ini muncul dari kepribadian yang melebihi masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat Tunggalpager mempercayai akan kelebihan kepribadian seseorang kyai tersebut. Kelebihan ini bisa karena

[13] Hasil wawancara dengan Sukirman, 12 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan agamanya yang luas atau kepribadiannya yang baik dimata masyarakat. Sehingga dengan kharismatiknya, kyai bisa menjalankan fungsinya tersebut dengan baik.

Menurut beberapa responden seorang kyai wajib di hormati karena beberapa alasan yaitu:

a. Kyai adalah orang yang dituakan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap kyai seperi orang tua sendiri. Hal ini tergambar dari pengakuan bapak Sunarto sewaktu mengundurkan diri dari bursa pencalonan kepala desa.
b. Kyai memiliki banyak ilmu agama yang tinggi dan setiap orang tidak bisa memilikinya. Kedalaman ilmu agama yang dimiliki para kyai tidak hanya pada tataran teoritis, melainkan juga diimplementasikan dalam tingkah laku konkrit dalam kehidupan sehari-hari.
c. Saran atau petuah yang disampaikan kyai sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Saran-saran yang disampaikan kepada masyarakat atau individu yang kebetulan sowan ke rumah kyai membawa kesejukan dan ketenangan jiwa, sehingga dalam menghadapi masalah akan berpikir jernih. Tidak gegabah mengambil keputusan yang berujung pada penyesalan.
d. Kyai memiliki kharisma yang biasanya di peroleh dari keturunan ataupun kelebihan yang di berikan dari Tuhan YME. Kharisma ini akan terpancar pada kepribadian dan tingkah lakunya yang selalu menjadi suri tauladan santri dan masyarakat sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa alasan diatas dapat menjadi pedoman bagi warga di lingkungannya untuk mengikuti apa yang disarankan kyai baik di bidang politik maupun non politik. Kepercayaan ini lebih didasarkan bahwa selama ini kyainya memang dapat dipercaya dari segala perilaku yang pernah dilakukan kyainya, dalam segala hal. Kalau mereka memfatwakan sesuatu, maka mereka akan berpegang teguh pada fatwa tersebut dan tidak mengingkarinya.

2. Keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Dari berbagai responden ada beberapa kegiatan yang mengindikasikan keterlibatan kyai dalam Pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2007. Bentuk-bentuk keterlibatannya adalah sebagai berikut:

a. Merestui pencalonan seorang calon

Sebelum mencalonkan diri pada pilkades 2007 kemarin Gus Ma'ruf melakukan sowan kepada para kyai yang ada di desa Tunggalpager. Hal ini dilakukan untuk mempererat tali silaturrohmi juga untuk minta restu kepada mereka.

Kegiatan ini juga diakui oleh Gus Miftah adik kandung Gus Ma'ruf yang diajak sowan kepada para kyai di desa Tunggalpager.

> "Sebelum mencalonkan diri, kakak (gus Ma'ruf) terlebih dahulu *sowan* kepda kyai-kyai yang ada di desa ini, bahkan juga kepada kyai-kyai musholla yang disebut sebagai oleh kyai kampung oleh Gus Dur. Sebab mereka juga merupakan panutan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar dan kedekatan mereka akan mempengaruhi pilihan warga yang berada di kanan kirinya".[14]

Berkaitan dengan restu kyai kepada seorang calon akan membawa dampak pada pilihan warga setempat yang memiliki komitmen terhadap kyai tersebut. Bapak Asnawi mengatakan; "*Kulo niki nopo jare yai mawon. Kangge kulo yai niku imam, kulo niki makmum*"[15] (saya ini apa kata kyai saja. Bagi saya kyai itu adalah imam sedangkan saya adalah makmum).

Pengakuan bapak Asnawi di atas, memberikan fakta bahwa restu kyai kepada seorang calon Kepala Desa dalam Pilkades di Desa Tunggalpager, diartikan oleh warga sekitar sebagai bentuk dukungan kepada seorang calon Kepala Desa tersebut.

Penafsiran ini akan berimplikasi pada suatu keyakinan bahwa kyai tersebut merestui, mendoakan dan mendukung calon Kepala Desa untuk maju melanjutkan keinginannya menjadi Kepala Desa terpilih. Artinya restu kyai terhadap calon kepala desa akan memberikan kontribusi positif bagi calon tersebut untuk memenangkan proses pilkades di Desa Tunggalpager kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Adanya restu kyai dianggap dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi bagi calon untuk memenangkan proses pemilihan, sekaligus bentuk dukungan yang akan diikuti oleh dukungan warga sekitar dan para pengikutnya.

---

[14] Hasil wawancara dengan Gus Miftah, 12 Juni 2010
[15] Hasil wawancara dengan bapak Asnawi, 15 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ceramah-ceramah keagamaan atau pengajian

Pada Pilkades desa Tunggalpager tahun 2007 kemarin, beberapa kyai juga terlibat dalam penyadaran warga akan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jiwa keimanan yang kuat, amanah, berkomitmen terhadap penyiaran agama Islam dan *berakhlakul karimah*. Bentuk penyadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang adil, dan dapat dipercaya dilakukan pada acara-acara pengajian atau ceramah-ceramah keagamaan.

Sewaktu diundang untuk memberikan ceramah pada acara hajatan bapak Ponari, Kyai Abd. Ghofur juga berpesan kepada para undangan untuk mensukseskan Pilkades di desa Tunggalpager dengan memilih calon kepala desa yang jujur, amanah, dapat dipercaya, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bertanggung jawab. Jangan hanya memilih karena uang atau kekayaannya. Sebab pilihan yang diberikan kepada calon kepala desa dengan benar akan memberikan manfaat bagi kemajuan desa Tunggalpager pada masa-masa mendatang.[16]

Sama halnya dengan Kyai Abdul Ghofur, Gus Son (putra Kyai Mahfud) sewaktu memberikan ceramah di Musholla Al Ihsan dusun Jelak dalam acara pengajian rutin, secara terang-terangan juga menyebutkan agar para jama'ah memilih Gus Ma'ruf dalam Pilkades di desa Tunggalpager tahun 2007.

[16] Hasil wawancara dengan bapak Ponari, 15 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baginya, Gus Ma'ruf memiliki kelayakan menjadi kepala desa Tunggalpager mendatang.[17]

Dalam acara walimatul khitan, Gus Muhajir (putra Kyai Abd. Ghofur pengasuh pondok pesantren Al Muhajirin) memberi pesan-pesan politiknya tentang keunggulan calon Kepala Desa Tunggalpager yaitu Gus Ma'ruf dan anjuran untuk memilihnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan salah seorang responden yaitu bapak Atmojo "*Waktu diundang mengisi walimatul khitan, Gus Muhajir menyebutkan kebaikan Gus Ma'ruf dan mengajurkan para hadirin untuk memilihnya menjadi Kepala Desa Tunggalpager*".[18]

Menurut penulis, Kyai Abd. Ghofur, Gus Son, dan Gus Muhajir adalah warga negara yang aktif dalam partisipasi politik meski hanya dalam wilayah lokal yaitu Pilkades, karena melihat perilaku politiknya dalam Pilkades Desa Tunggalpager yang terwujud dalam memberikan suara, aktif mencari dukungan dalam masyarakat untuk memenangkan dan mensukseskan Gus Ma'ruf menjadi Kepala Desa Tunggalpager periode 2007 - 2014.

c. Memberikan Anjuran kepada masyarakat untuk aktif mencari dukungan terhadap calon kepala desa.

Acara dukung-mendukung dan mencari serta menginventarisasi dukungan dilakukan sebelum pemilihan berlangsung. Dalam hal ini rakyat memiliki kebebasan untuk menghadiri kampanye. Kegiatan mencari

---

[17] Hasil wawancara dengan Syafi'i (anggota pengajian rutin), 15 Juni 2010
[18] Hasil wawancara dengan bapak Atmojo, 12 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan di lakukan oleh peserta pemilu selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pencarian dukungan di lakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Peran kyai dalam menyebarkan berita disekitar pesantren kepada masyarakat memiliki peran penting. Bukan hanya sekedar menyebarkan berita, tetapi juga menugasi para santri atau orang yang didekat di sekitar pesantren untuk mencarikan dukungan pada calon yang dianggap mumpuni dalam mengemban amanah.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan salah satu santri bahwa:

> "Kami pernah ditugasi untuk mencarikan dukungan bagi Gus Ma'ruf. Bahkan mendekati kelompok masyarakat yang kurang setuju terhadap pencalonan Gus Ma'ruf dalam pilihan kepala Desa saat itu". Tujuannya adalah mengajak mereka untuk memilih Gus Ma'ruf dalam pilihan kepala desa".[19]

Bukan hanya itu saja, warga yang kebetulan sowan ke rumah kyai, juga dianjurkan dan diajak untuk memilih Gus Ma'ruf. Mereka juga diharapkan mampu mengajak keluarga atau teman-teman dekatnya untuk ikut serta dalam mendukung dan memilih Gus Ma'ruf pada saat pemilihan pilkades berlangsung.

Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Sanusi dalam wawancara dengan penulis, "Sewaktu saya sowan kepada Kyai Maghfur, beliau juga

[19] Hasil wawancara dengan Ahmad Sanusi, 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyarankan dan mengajak saya untuk mencarikan dukungan bagi Gus Ma'ruf". [20]

Dari beberapa informasi yang diterima penulis juga menjelaskan menjelaskan keterlibatan kyai dalam proses pemilihan kepala desa Tunggalpager tahun 2007 dengan mengajurkan dan mengharap warga setempat mensukseskan Pilkades dengan jalan memberi dukungan dan mengkampanyekan sekaligus mensosialisasikan pencalonan Gus Ma'ruf sebagai kepala desa pada Pilkades Tunggalpager tahun 2007.

Sedangkan berkaitan dengan tanggapan masyarakat tentang keterlibatan kyai dalam Pilkades desa Tunggalpager, dari tanggapan responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis yaitu pilkades.

   Mereka menginginkan agar kyai tidak terjun ke dunia politik praktis,, untuk menjaga kharisma dan kewibawaannya. Sebab kyai yang terjun ke dunia politik biasanya sedikit demi sedikit akan kehilangan kewibawaan dan harga dirinya. Bahkan tidak jarang tugas utama untuk mendidik umat tentang persoalan keagamaan terlupakan.

   Salah satu responden yang tidak setuju dengan keterlibatan kyai dalam politik terutama pilkades mengungkapkan:

[20] Hasil wawancara dengan bapak Sanusi, 15 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kyai yang ikut-ikutan ngurusi pilkades atau partai politik niku kyai nopo ? Lha wong tugasnya di pondok sudah berat koq malah ngurusi politik. Pilkades iku urusan politik, ya serahkan sama yang punya keahliannya. Kyai cukup ngurusi pondok dan masalah keagamaan saja".[21]

Senada dengan pendapat di atas, Sujarwo mengatakan:

"Saya kurang setuju bila kyai ikut cawe-cawe pilkades. Sebab rata-rata pilkades itu banyak terjadi jual beli suara, tidak bersih dari persoalan uang. Sehingga kyai yang ikut ngurusi pilkades bisa tidak dipercaya lagi oleh warga atau masyarakat sekitar".[22]

Peran kyai secara ideal adalah yang bersih dari politik praktis dan mengembalikan posisi sebagai sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengedepankan kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, serta mengembalikan ulama sebagai pemimpin yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya posisi kyai dimanfaatkan oleh elite politik

2) Sebagian warga membiarkan keterlibatan kyai dalam pilkades.

Bagi mereka tidak ada alasan kyai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri, karena dengan pimpinan yang amanah akan dapat membantu menyebarkan syiar Islam.

Bapak Sukardi menjelaskan kepada penulis, bahwa boleh-boleh saja kyai ikut berpolitik dalam pilkades, sebab semua orang punya hak yang

[21] Hasil wawancara dengan bapak Mustakim, 15 Juni 2010
[22] Hasil wawancara dengan bapak Sujarwo, 15 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama untuk menyatakan pendapat. Pilkades tidak ada perbedaan status atau golongan dalam masyarakat. Jadi semua warga boleh ikut menentukan pilihan dan mendukung pilihannya tersebut.[23]

Ibu Sumarlik juga menyebutkan: "*Ya boleh saja kyai ikut ngurusi pilkades, karena tidak ada aturan yang melarangnya*".[24]

3) Sebagian menyetujui keterlibatan kyai dalam kegiatan pilkades asalkan tidak melupakan tugas utamanya mendidik umat tentang masalah-masalah keagamaan.

Persayaratan yang diberikan masyarakat kepada kyai dalam kegiatan politik praktis (pilkades) dengan tidak melupakan tugas utamanya adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat agar para kyai mampu menjaga nama dan harga dirinya di hadapan publik.

Bapak Ramlan, menyebutkan bahwa kyai yang ikut-ikutan dalam pilkades boleh saja dan hal itu sangat wajar asalkan tetap pada posisi kekyaiannya.[25]

---

[23] Hasil wawancara dengan bapak Sukardi, 12 Juni 2010
[24] Hasil wawancara dengan ibu Sumarlik, 10 Juni 2010
[25] Hasil wawancara dengan bapak Ramlan, 12 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa data penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna kepemimpinan Kyai di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah bahwa kyai wajib dipatuhi. Kepatuhan masyarakat terhadap kyai yang ada di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang dianggap memiliki kelebihan dari orang lain, para kyai sering dimintai saran atau pendapat dalam persoalan-persoalan yang kerap kali muncul dalam wacana kehidupan sehari-hari. Kekuatan kepemimpinan kyai di Desa Tunggalpager yang didukung dengan kharisma akan membuat masyarakat semakin patuh. Kharisma yang dimilikinya akan membuat warga sekitar merasa segan untuk menolak ajakan atau himbauan. Mereka menganggap para kyai memiliki kelebihan akan hal-hal ghoib yang masih kental dalam pola pikir mereka.

   Ada beberapa alasan mengapa seorang kyai wajib di hormati yaitu:

   a. Kyai adalah orang yang dituakan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap kyai seperi orang tua sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kyai memiliki banyak ilmu agama yang tinggi dan setiap orang tidak bisa memilikinya.

c. Saran atau petuah yang disampaikan kyai sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.

d. Kyai memiliki kharisma yang biasanya di peroleh dari keturunan ataupun kelebihan yang di berikan dari Tuhan YME.

2. Keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Dari berbagai responden ada beberapa kegiatan yang mengindikasikan keterlibatan kyai dalam Pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2007. Bentuk-bentuk keterlibatannya adalah sebagai berikut:

a. Merestui pencalonan seorang calon

b. Ceramah-ceramah keagamaan atau pengajian

c. Memberikan Anjuran kepada masyarakat untuk aktif mencari dukungan terhadap calon kepala desa.

Sedangkan tanggapan masyarakat desa Tunggalpager terhadap keterlibatan kyai dalam pilkades dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis yaitu pilkades

b. Sebagian warga membiarkan keterlibatan kyai dalam pilkades

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebagian menyetujui keterlibatan kyai dalam kegiatan pilkades asalkan tidak melupakan tugas utamanya mendidik umat tentang masalah-masalah keagamaan.

B. Saran-saran

1. Bagi pemerintah setempat hendaknya dapat lebih meningkatkan pendidikan politik masyarakat desa Tunggalpager.
2. Bagi kyai hendaknya lebih meningkatkan perannya sebagai tokoh agama dalam masyarakat.
4. Bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin seharusnya memperhatikan visi dan misi calon yang dipilihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muiz Ruslan, Ustman, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2000.

Almond Gabriel A. dan Sidney verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara,* Alih Bahasa Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Angkasa, 1990.

Bruinessen, Martin van. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik.* Yogyakarta: Bentang Budaya. 1998.

Budiarjo, Miriam *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai).* Jakarta: LP3ES. 1994.

Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa.* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Cetakan Pertama (1). 1999

Faridl, Miftah, *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007.*

Geertz. Clifford *Abangan, santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa* (Terjemahan oleh Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Haricahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991.

Hadi, Krishno dkk, *Perilaku Partai Politik*, Malang: UPT UMM Press, 2006.

http://mbangun-desa.blogspot.com/2010/02/pilkades sarana mewujudkan demokrasai. html

Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang,* Alih bahasa Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, Jakarta: Visi Publishing, 2003.

Kuntowijowo. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yoyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1999.

Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Marcridis, Roy C. dan Benard E. Brown, *Perbandingan Politik*, Alih bahasa A.R. Henry Sitanggang, Jakarta: Erlangga, 1992.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Mulkan, Abdul Munir, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*," Rajawali Press, Jakarta, 1989.

Muthohar, Ahmad. *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren Ditengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan (Ikhtiar Memotret & Mencari Formulasi Baru Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Berbagai Ideologi Pendidikan Kontemporer)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.

Naqiyah, Najlah, *Otonomi Perempuan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

PP RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.tt.

Rachmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1985

Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia: Dalam Perspektif Struktural Fungsional,* Surabaya: Penerbit SIC kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya, 1998.

Rush Michael dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik,* Alih bahasa Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

----------, *Wajah Perpolitikan di Indonesia*, , Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. Ke-111998.

Sukardi. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan,* Yogyakarta: Usaha Keluarga, 2006.

Suprayogo, Imam, *Kiai dan Politik di Pedesaan: Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik Kiai* (Ringkasan Disertasi). (Jurnal STAIN Malang No. 5. Malang: LP3M, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, ed. 12, Jakarta, Andi Offset, 2001.

Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* Yogyakarta: LkiS, 2004.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Wahid, Abdurrahman *Menggerakkan Tradisi (Esai-Esai Pesantren).* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.

www.Wikipedia.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id